

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Fikri Hadin ,Eksistensi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di era Otonomi Daerah, Genta Press,Yogyakarta.

Anton Maulana,2009,''' Peranan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah di desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ''skripsi,FEIS UIN Sultan Syarif kasim, Pekanbaru.

Arifin Abdul Rahman,Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan,cv Haji Mass Agung ,Jakarta,2001.

Bastian Indra , Akuntansi Sektor Publik,BFEP,Yogyakarta,2001.

Bernadin,dan Russel ,2003 Human Resource Management (an Experimental Approach Internatonal Edition). Mc. Graw- Hill inc Singapore.

C. Gomes,2003,Manajemen Sumber Daya Manusia ,Penerbit Andi,Yogyakarta.

Diah Cristia Dewi, 2013, "Kedudukan dan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Serta Tata Hubungan Antara Keduanya Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Skripsi, FH UNEJ, Jember.

George R Terry, Prinsip Prinsip Manajemen Cetakan ke 11, Bumi Aksara,Bandung,2013.

Hasan al-Banna, Majmu'ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasan al-Banna, alih bahasa, Su'adi Sa'ad, "Konsep Pembaruan Masyarakat Islam", Jakarta: Media Da'wah, 1986.

Herma Yanti,Mekanisme Pengawasan Peraturan Daerah Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Moh kusnaidi, Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Cetakan 7,Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta, 1988.

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Fiqih Politik Hasan al-Banna, Terj. Odie al-Faeda, Solo: Media Insani, 2003.

Muhammad Taqwa, 2016, " Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD DiDesa Makkawaru", Skripsi, FH UNHAS, Makassar.

M.Manulang, Dasar – Dasar Manajemen Cetakan ke 23,Gajah Mada Press, Yogyakarta,2015.

Ni'matul Huda,Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi,Raja Grafindo Persada,Jakarta,2015.

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan desa Dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi,Setara Press, Malang,2015.

Nuridin usman, Konteks Implementasi berbasis kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002.

Philppus m Hadjon,dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara,Gajah Mada Universty Press,Yogyakarta,2008.

Sondang P siagian,2010,Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara ,Jakarta.

Sulistiono,2012, Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, Skripsi, Program Sarjana, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sutoro Eko'' Masa Lalu Mas kini dan Masa Depan Otonomi Desa'', dalam Sutandyo Wignosubrata Dkk(tim penulis)Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 tahun , Institute for Local Development dan Yayasan Tifa , Jakarta,2005.

W. Widjaja, 2001, Pemerintah Desa/Marga, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Data Elektronik

<https://www.kompasiana.com/indria.sari/551fe6a8a333114340b65ee8/men>

[genal-sistem-pemerintahan-islam](#) diakses pada hari Rabu 10 Juli 2019

Pukul 18.30 wib.

